

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada telah disahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada hal ini dinilai telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada kurang maksimal dikarenakan anggaran yang dianggarkan oleh tiap-tiap program dan kegiatan telah difocusing untuk penanganan bencana non alam (Covid-19) sehingga ada beberapa program yang belum dengan baik. Proses penganggaran dinilai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah namun, hal ini belum berjalan secara maksimal dan baik dikarenakan adanya refocusing anggaran yang diakibatkan oleh bencana non alam (Covid 19).
- c. Pelaksanaan yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada sudah dinilai cukup maksimal dikarenakan pada tahap pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada telah melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi dan hukum

yang berlaku yang mana berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.2 Saran

Saran yang diajukan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh peneliti untuk mengatasi sejumlah kesulitan atau permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada dalam pengelolaan anggaran yakni :

- a. Untuk mengatasi inefisiensi dan infektivitas dalam proses perencanaan sebagai akibat mekanisme birokrasi dalam pengelolaan anggaran di lingkup pemerintah daerah yang cukup panjang dan rumit dengan ini direkomendasikan kepada Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada untuk melaksanakan rapat teknis perencanaan sebelum adanya rapat paripurna DPRD dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b. Untuk mengatasi pelaksanaan pengelolaan anggaran yang terkendala anggaran yang di *refocusing* sepatutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengajukan permintaan bantuan anggaran ke BNPB Indonesia sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat diselenggarakan.